



tribunjogja.com

ARIAN PAGI

TRIBUN

JARU DIY.

LAN - LANGGANAN: €

# Antrean Panjang Bikin Ribet

■ Wacana Penerapan Retribusi Buang Sampah di Depo Kota Yogya

GRATIS PENGARAHAN

**Enggak apa-apa kalau yang ditarik retribusi itu sampah-sampah anorganik yang tidak bisa diolah di level rumah tangga, ya.**

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota Yogyakarta mengulirkan wacana penerapan kebijakan pembuangan sampah berbayar di depo. Wacana ini mendapat tanggapan beragam dari publik Kota Yogya. Terlebih, dalam beberapa pekan terakhir, wacana tersebut bergulir, sekaligus menjadi sorotan publik di berbagai lini media sosial.

Uji coba sistem buang sampah berbayar sudah berlangsung pada 29 Oktober hingga 4 November 2024 ini secara bergantian di Depo Pengok, Argolubang, dan Purawisata. Sepanjang uji coba, petugas hanya melakukan penimbangan bobot sampah yang hendak dibuang

● ke halaman 7

## Antrean Panjang

• Sambungan Hal 1

warga ke depo, tanpa ada penarikan retribusi. Setelah ditimbang, warga akan menerima catatan berisi berat sampah dan perkiraan biayanya.

Yosef, warga Gondokusuman, mengaku sempat terkejut saat membuang sampah di Depo Argulubang sekitar dua minggu lalu. Bagaimana tidak, saat itu, dirinya mendapati setiap limbah yang hendak dibuang harus melewati proses penimbangan terlebih dahulu.

"Terakhir ditimbang itu, kalau enggak salah 21 Oktober kemarin, di Argolubang. Menimbang enggak dilirik duit, cuma ditimbang," katanya, Jumat (1/11).

Namun, berdasar pengamatannya, Yosef menilai, petugas yang melakukan aktivitas penimbangan dirasa belum benar-benar siap. Pasalnya, aktivitas tersebut menimbulkan antrean cukup panjang, lantaran timbangan yang disiapkan hanya dua unit saja.

"Timbangannya cuma dua, sementara yang mau buang sampah kan banyak banget. Jadinya, sampai antre panjang itu. Apalagi, deponya cuma buka dua jam. Tapi, minggu ini terakhir saya buang ke sana sudah tidak ada (penimbangan) lagi," cetusnya.

Secara umum, ia mengungkapkan, jika nantinya retribusi yang dipatok cenderung tinggi, maka berpotensi memberatkan masyarakat. Namun, secara pribadi, Yosef mengaku tidak keberatan, seandainya tarif ditetapkan untuk limbah jenis anorganik yang tidak terolah di rumah tangga.

"Enggak apa-apa kalau yang ditarik retribusi itu sampah-sampah anorganik yang tidak bisa diolah di level rumah tangga, ya," ucapnya.

Yanti, warga Danurejan, menjelaskan, dirinya sempat mendapati aktivitas penimbangan di Depo Argolubang beberapa waktu lalu. Setelah tiga hari, meski sampah yang akan dibuang harus

ditimbang terlebih dahulu, ia sama sekali tidak ditarik retribusi oleh petugas.

"Cuma dikasih kartu begitu, dikasih tabu, kalau sampahnya tergilang bayarnya Rp500 sekilo, tapi kalau tidak tergilang, jadi Rp1.000," jelasnya.

### Dilema

Yanti tidak memungkiri, aktivitas penimbangan memang membuat agenda buang sampah jadi lebih ribet, karena diperlukan waktu dan sedikit mengganggu pekerjaannya di pagi hari. Namun, perempuan yang sehari-harinya berprofesi sebagai pedagang itu mengaku dilematis, ketika ditanya setuju atau tidak dengan kebijakan tersebut.

"Dilema juga, sebenarnya enggak apa-apa bayar, daripada kita enggak bisa membuang sampah. Tapi, ya lebih baik tidak membayar," ucapnya.

Warga lainnya, Yanti dari Tegol Panggung, mengungkapkan, sudah dua pekan ini ia harus antri di Depo Argolubang untuk menimbang sampah yang dibawa. Antrean yang panjang dan proses penimbangan satu per satu dirasanya cukup mengganggu warga. Bahkan, tak sedikit warga yang frustrasi di tengah antrean lantaran dan protes lantaran membuang waktu untuk menunggu, padahal mereka harus bergesah memulai aktivitas.

"Terutama pagi-pagi, antreannya sangat panjang dan membuat banyak orang yang punya jadwal padat kesulitan untuk berangkat kerja," tuturnya.

Ketika ditanya tentang rencana retribusi pembuangan sampah, Yanti merasa dilema. "Daripada tidak bisa buang sampah, bayar juga tidak apa-apa. Tapi, saya juga sudah membayar iuran sampah di RT, jadi rasanya double," ujarnya.

Ose, warga Baciro, Yogyakarta, berpendapat bahwa jika kebijakan retribusi berdasarkan berat sampah diterapkan, bisa jadi jumlah sampah liar justru meningkat. "Kalau harus menimbang dan bayar, banyak yang mungkin akan buang

sampah sembarangan," ungkapnya, sembari menyarankan agar retribusi hanya dikenakan terhadap sampah anorganik, yang lebih sulit diolah di rumah tangga.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Ahmad Haryoko, menjelaskan bahwa saat ini retribusi pembuangan sampah belum diberlakukan. Selama masa uji coba, masyarakat diwajibkan menimbang sampah yang akan dibuang. Haryoko juga meminta agar masyarakat melaporkan jika ada oknum yang menarik retribusi secara ilegal.

"Jika ada yang mengenakan biaya, mohon dilaporkan karena itu bukan perintah dari DLH," tegasnya.

### Masih kajian

Besaran retribusi yang mungkin diterapkan nantinya akan ditentukan berdasarkan berat sampah yang dibuang, dan sistem ini akan diselaraskan dengan jadwal pengelolaan sampah di depo. Dengan adanya uji coba ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami sistem pembuangan sampah yang baru dan berkontribusi dalam mengurangi jumlah sampah yang tidak terkelola dengan baik.

Ahmad mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian terkait wacana tersebut. Menurutnya, sebelum melangkah lebih jauh, dibutuhkan data komprehensif terkait kondisi masing-masing depo di Kota Yogyakarta. "Jadi, belum sampai ke taraf nantinya berbayar berapa, belum sampai situ. Ini baru kajian, menghitung masing-masing depo, jumlah pembuangannya, volume sampahnya, kemudian penggerobaknya berapa," tandasnya.

Setelah Depo Pengok, Argolubang, dan Purawisata, rencananya uji coba juga dilakukan untuk Lapangan Karang dan Mandala Krida. "Kita pindah-pindah karena masih menghitung jumlah-jumlahnya," terangnya.

Menurutnya, penerapan kebijakan pembuangan sampah berbayar di depo pun tidak akan semudah memb-

lik telapak tangan. Pihaknya perlu berkoordinasi lebih dahulu dengan kalangan legislatif, untuk proses perubahan peraturan daerah (perda).

"Penentuan tarif dan sebagainya ada keterlibatan dewan juga, sudah pasti kalau itu. Karena, kita harus mengubah Perda, tidak bisa aturannya berdiri sendiri. Makanya, sekarang masih kajian, aplikasinya belum. Nanti hasil kajiannya kami tuangkan di Raperda, agar masuk dalam pembahasan bersama teman-teman DPRD," ungkap Haryoko.

### Redam pembuangan

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, mengatakan, berbagai upaya harus ditempuh Pemkot untuk menyelesaikan polemik sampah. Wacana retribusi sampah di depo tersebut sengaja dipungkirkannya ke publik, untuk meredakan tingkat pembuangan warga masyarakat khususnya ke depo.

"Harapannya, itu bisa meminimalisasi pembuangan. Kemudian, kontribusi yang ada akan kita kembalikan untuk pengelolaan sampah," cetusnya.

Beberapa waktu lalu, ia sempat menyinggung terkait volume harian sampah di Kota Yogyakarta yang masih menyentuh 200 ton. Sementara, unit-unit pengolahan sampah yang dislagakannya belum mampu menyelesaikan total produk sampah harian tersebut.

"Memang, kami punya tempat untuk pengolahan sampah. Tapi, sekarang belum optimal operasionalnya. Belum bisa menyelesaikan 200 ton," jelasnya.

Lebih lanjut, Sugeng menyampaikan, keempat tempat pengolahan sampah di Nilukan, Karangmiri, Kranon, dan Pyungan terus disempurnakan. Dirinya meyakini, ketika tidak mengalami kendala berarti, unit-unit tersebut dalam waktu dekat dapat dimaksimalkan kuota pengolahannya.

"Kalau proses pengolahannya berjalan lancar, tidak ada kendala, nanti produksi sampah harian bisa diselesaikan di empat titik itu," ujarnya. (aka/han)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005